



PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG
**DINAS PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH**

Jalan Firdaus H. Rais No. 38 Singkawang, Kode Pos 79123

Telepon : (0562) 631425 Faksimile : (0562) 631425

Laman : disdaginkop.singkawangkota.go.id, Pos-el : daginkopukm@singkawangkota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 109 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN, KOPERASI
DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka perlu diselenggarakan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang;
- b. bahwa untuk merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi menuju pelayanan informasi yang cepat, mudah, dan wajar perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah

diubah...

diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2017 Nomor 157);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 42);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 82);
14. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Standar Operasional Prosedur Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 125);
15. Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kota Singkawang Nomor 100.3.3.6/118/DN-11.IKP Tahun 2025 tentang Daftar Informasi Publik Pemerintah Kota Singkawang.

Memutuskan...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Menetapkan Daftar Informasi Publik di Lingkungan Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kota Singkawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, asas kepatutan dan kepentingan umum;
- KETIGA : Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terdiri atas informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, wajib disediakan dan diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat;
- KEEMPAT : Informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didasarkan atas pertimbangan peraturan perundang-undangan yang berlaku, asas kepatutan dan asas kepentingan umum serta bersifat ketat dan terbatas;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkawang
Pada Tanggal 08 Juli 2025

a.n Walikota Singkawang
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian,
Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah,



ANTIN SUPRIHATIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN,
KOPERASI, DAN USAHA KECIL MENENGAH
NOMOR 109 TAHUN 2025 TENTANG
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK DI
LINGKUNGAN DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH KOTA SINGKAWANG
TAHUN ANGGARAN 2025 TANGGAL 08 Juli
2025

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

No.	Ringkasan Isi Informasi		Penanggungjawab Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Keterangan
					Soft Copy	Hard Copy	
A	Informasi Yang Berkaitan Dengan Badan Publik						
	Mengumumkan informasi LHKPN Pejabat Daerah yang telah diperiksa, diverifikasi, dan telah dikirimkan oleh KPK untuk disediakan / diumumkan pada website Badan Publik dan PPID (bukan dalam bentuk link KPK) yang terdiri dari :						
1	a	Pejabat Eselon II dan pejabat lain yang disamakan di lingkungan Badan Publik	Sub. Bagian UKA	Tahun n-1	√	√	-
	b	Mengumumkan informasi jumlah dan presentase yang wajib LHKS dalam lingkup Badan Publik (bukan website KPK)	Sub. Bagian UKA	Tahun n-1	√	√	-
B	Informasi tentang program dan / atau kegiatan Badan Publik yang bersifat strategis sesuai tugas dan fungsi						
1	Mengumumkan program atau kegiatan (DPA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program / kegiatan, penanggungjawab / pelaksana program, sumber anggaran, besaran anggaran		Sub. Bagian PEKK	Tahun Berjalan (n)	√	√	Disajikan dalam bentuk Matriks Tabel

2	Mengumumkan program atau kegiatan yang sedang dilaksanakan (Evaluasi RENJA) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program / kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	Sub. Bagian PEKK	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
3	Mengumumkan program atau kegiatan yang telah dilaksanakan (LAKIP) melalui website Badan Publik dan PPID, sekurang-kurangnya memuat nama program / kegiatan, realisasi anggaran, pencapaian kegiatan	Sub. Bagian PEKK	Tahun n-1	√	√	Disajikan dalam bentuk Matriks Tabel
4	Rencana Strategik Badan Publik	Sub. Bagian PEKK	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
C	Laporan Keuangan					
	Mengumumkan dalam website Badan Publik dan PPID informasi Laporan Keuangan yang telah di audit yang terdiri dari :					
1	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Sub. Bagian PEKK	Tahun n-1	√	√	-
2	Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)	Sub. Bagian PEKK	Tahun n-1	√	√	-
3	Daftar Aset dan Inventaris	Sub. Bagian PEKK	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
4	Neraca	Sub. Bagian PEKK	Tahun n-1	√	√	-
5	Ringkasan RKA OPD	Sub. Bagian PEKK	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
6	Ringkasan DPA OPD	Sub. Bagian PEKK	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
7	Informasi Realisasi atau penyerapan anggaran (RFK)	Sub. Bagian PEKK	Tahun Berjalan (n)	√	√	-

D	Pengadaan Barang dan Jasa						
	Menyediakan Lima (5) dokumen pengadaan barang dan jasa yang telah di audit / verifikasi						
I	Tahap Perencanaan, meliputi :						
	1	Dokumen Rencana Umum Pengadaan (RUP) program atau kegiatan sesuai tugas dan fungsi Badan Publik sebagaimana tercantum dalam SIRUP	Sub. Bagian UKA	Tahun n-1	√	√	-
II	Tahap Pemilihan, meliputi :						
	1	Kerangka Acuan Kerja (KAK)	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	2	Harga Perkiraan Sendiri (HPS) serta riwayat HPS	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	3	Spesifikasi Teknisi	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	4	Rancangan Kontrak	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	5	Dokumen Persyaratan Penyedia atau Lembar Data Kualifikasi	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	6	Dokumen Persyaratan Proses Pemilihan atau Lembar Data Pemilihan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	7	Daftar Kuantitas dan Harga	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	8	Jadwal pelaksanaan dan data lokasi pekerjaan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	9	Gambar Rancangan Pekerjaan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	10	Dokumen Studi Kelayakan dan Dokumen Lingkungan Hidup, termasuk Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	11	Dokumen Penawaran Administratif	PPK	Tahun n-1	√	√	-

	12	Surat Penawaran Penyedia	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	13	Sertifikat atau Lisensi yang masih berlaku dari Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	14	Berita Acara Pemberian Penjelasan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	15	Berita Acara Pengumuman Negosiasi	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	16	Berita Acara Sanggah dan Sanggah Banding	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	17	Berita Acara Penetapan atau Pengumuman Penyedia	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	18	Laporan Hasil Pemilihan Penyedia	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	19	Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ)	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	Menyediakan dokumen surat-surat perjanjian dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya						
	20	Daftar Memorandum of Understanding (MoU) atau Perjanjian Kerjasama sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Publik	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
III	Tahap Pelaksanaan, meliputi :						
	1	Dokumen Kontrak yang telah ditandatangani beserta Perubahan Kontrak yang tidak mengandung informasi yang dikecualikan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	2	Surat Perintah Mulai Kerja	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	3	Surat Jaminan Pelaksanaan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	4	Surat Jaminan Uang Muka	PPK	Tahun n-1	√	√	-

	5	Surat Jaminan Pemeliharaan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	6	Surat Tagihan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	7	Surat Pesanan <i>E-purchasing</i>	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	8	Surat Perintah Membayar	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	9	Surat Perintah Pencairan Dana	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	10	Laporan Pelaksanaan Pekerjaan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	11	Laporan Penyelesaian Pekerjaan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	12	Berita Acara Pemeriksaan Hasil Pekerjaan	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	13	Berita Acara Serah Terima Sementara atau <i>Provisional Hand Over</i>	PPK	Tahun n-1	√	√	-
	14	Berita Acara Serah Terima atau <i>Final Hand Over</i>	PPK	Tahun n-1	√	√	-
E	Informasi Terbuka Lainnya						
	Mengumumkan Ringkasan Tentang Laporan Akses Informasi Publik (Laporan PPID) yang memuat tentang :						
	1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
	2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
	3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
	4	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasan penolakan Permintaan Informasi Publik	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-

	Mengumumkan Prosedur Pelayanan Akses Informasi Publik yang dapat disediakan berupa Poster / Pengumuman / Infografis di Website PPID dan / atau media sosial Badan Publik					
5	Tata cara memperoleh informasi publik disertai informasi waktu dan syarat pemohon	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
6	Tata cara pengajuan keberatan dan proses penyelesaian sengketa informasi publik berikut pihak yang bertanggungjawab	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
7	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Badan Publik	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
8	Tata cara atau prosedur peringatan dini dan prosedur evakuasi keadaan darurat di setiap kantor Badan Publik	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-

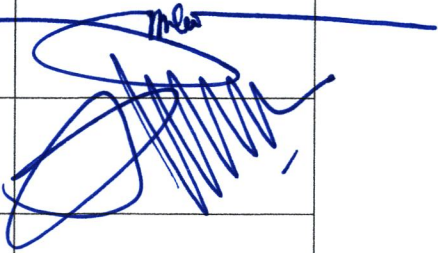
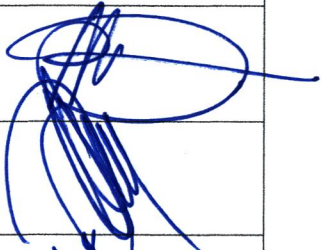
INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Keterangan
				Soft Copy	Hard Copy	
A	Informasi Tentang Organisasi, Administrasi, Kepegawaian dan Keuangan					
1	Profil Pegawai mengenai nama, karis, pendidikan, penghargaan (DUK)	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
2	Data statistik sektoral yang dibuat dan dikelola oleh Badan Publik	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
3	Standar Operasional Prosedur yang diberlakukan oleh Badan Publik	Sekretariat, Seluruh Bidang & UPT	Tahun Berjalan (n)	√	√	-
B	Informasi peraturan, keputusan dan / atau kebijakan yang mengikat publik yang dikeluarkan oleh Badan Publik					
1	Daftar rancangan dan tahap perumusan bagi peraturan, keputusan, dan / atau ketetapan yang sedang dalam proses pembuatan	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	Matriks Tabel memuat Nomor, Judul Draft, Status
2	Daftar peraturan, keputusan, dan / atau kebijakan yang telah disahkan atau ditetapkan	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	Matriks Tabel memuat Nomor, Judul Draft, Status
C	Informasi Setiap Saat Lainnya					
1	Menyediakan dokumen surat menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah Kota Singkawang dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenangnya	Sub. Bagian UKA	Tahun Berjalan (n)	√	√	Pengumuman /Surat Edaran

INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA SERTA MERTA

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggungjawab Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Bentuk Informasi Yang Tersedia		Keterangan
				Soft Copy	Hard Copy	
A	Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum					
1	Informasi tentang rencana gangguan terhadap utilitas publik	Bidang Terkait	Tahun Berjalan (n)	√	√	Informasi berupa Pemadaman Listrik, PDAM, Gangguan Jaringan Internet, Pengalihan Arus Lalu Lintas, dan lain-lain

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1	Antin Suprihatin, S.Sos., M.Si	Kepala Dinas	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
2	Sukaryat, SSTP	Sekretaris	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
3	Dedi Irawan, SE, ME	Kepala Bidang Perdagangan	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
4	Dwi Satrio Sepriyanto, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Perindustrian	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
5	Andreas Aan, S. Ak	Kepala Bidang Koperasi dan UM	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	
6	Wiryamor, ST	Plt. Kepala UPT. Metrologi Legal	Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Singkawang	

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

a.n Walikota Singkawang
KEPALA DINAS PERDAGANGAN,
PERINDUSTRIAN, KOPERASI, DAN UKM



ANTIN SUPRIHATIN

